





## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Latif ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

Drs. Suwito, M.Ag  
NIP.195405251985031001

Sekretaris

Wahid Hadi Purnomo, M.H  
NIP.197410252006041002

Penguji I,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag  
NIP.15704231986032001

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag  
NIP.196303271999032001

Pembimbing,

Drs. Suwito, M.Ag  
NIP.195405251985031001

Surabaya, 13 Juli 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002



## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang diadakan di pesantren PERSIS Bangil dengan judul “*Pandangan Asātiz* PERSIS Bangil terhadap Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana metode *istinbat* hukum PERSIS Bangil? Bagaimana pandangan *asātiz* PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama? Bagaimana analisis terhadap pandangan *asātiz* PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui *interview* dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *istinbat* hukum PERSIS Bangil adalah menggali langsung dari al-quran dan hadis dengan menggunakan *uṣul fiqh* yang biasa dipakai para ulama. Rumusan *uṣul fiqh* yang dipakai banyak terpengaruh *uṣul fiqh* imam Syafi'i dan terpengaruhi juga *uṣul fiqh* imam Hanafi. Tanggapan *asātiz* PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama direspons dengan baik, demi kemaslahatan bersama. Akan tetapi, ketentuan tersebut bagi mereka merupakan masalah administratif sehingga tetap menilai sah kalau perceraian terjadi di luar Pengadilan Agama. Mereka berpendapat ketentuan tersebut perlu ditinjau ulang, karena al-qur'an dan hadis tidak mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan. Pengadilan Agama seharusnya bertugas pula mencatat dan menetapkan perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama tetapi yang sudah sah menurut *syar'i*. Dalam menentukan suatu hukum PERSIS Bangil tetap berpegang terhadap pemahaman tekstual sehingga hukum Islam tidak bersifat fleksibel di setiap jaman. Seandainya perceraian di luar Pengadilan tetap sah, maka kemaslahatan umum kaum muslimin di Indonesia akan terhambat. Padahal perceraian pengadilan lebih sesuai dengan *syariat*, karena hakim menjadi *ḥakam* dalam persengketaan pasangan suami-istri tersebut, dan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai alasan-alasan perceraianya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan, *pertama*, kepada Persatuan Islam Bangil mengkaji permasalahan ini dalam Dewan Hisbah PERSIS sehingga mempunyai pengaruh berskala nasional dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjadikan kepentingan umum (kemaslahatan) menjadi dasar penetapan hukum pula. *Kedua*, kepada pemerintah untuk lebih intens menyosialisasikan makna perkawinan dan perceraian, demi memperkecil angka perceraian.











kepastian hukum bagi pasangan tersebut. Kemudian selain itu, pemerintah pun memperketat dan mempersulit perceraian dikarenakan efek *maḍārat* akibat perceraian sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Tindakan pemerintah ini dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, sesuai pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Dalam perundang-undangan perkawinan ada perbedaan yang menarik antara pencatatan perkawinan dan keharusan perceraian di Pengadilan Agama. Para hakim masih menganggap perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah tetap sah, meskipun tidak melakukan pencatatan perkawinan. Tetapi mereka tidak memiliki perlindungan hukum oleh negara. Demikian itu dikarenakan masih ada kesempatan bagi mereka ketentuan “ *isbat nikah* ”. Sedangkan dalam perceraian, tidak ada ketentuan atau istilah “ *isbat talaq* ”, sehingga beribu-ribu talak/cerai diucapkan suami kepada istrinya di luar Pengadilan Agama, cerainya tidak sah. Berbeda dengan para *fuqaha* dalam fikih klasiknya, yang menjelaskan bahwa cerai bisa dijatuhkan di mana saja dan kapan saja karena cerai adalah hak istimewa/prerogatif suami.

---

<sup>8</sup> Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, h. 1-2







## ***Asātiz* PERSIS BANGIL Terhadap Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama ”**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penulisan ini, disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Manhaj Istinbat* Hukum PERSIS Bangil ?
2. Bagaimana Pandangan *Asātiz* PERSIS BANGIL Terhadap Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana analisis terhadap Pandangan *Asātiz* PERSIS BANGIL tentang Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama?

### **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor: In. 02/1/PP.00.9/32.a/I/2010, tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, h. 7





Di samping beberapa buku di atas, ada beberapa penelitian serupa dengan skripsi ini, yaitu skripsi Qurrotul A'yuni, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009 yang berjudul “ *Kedudukan Talak Di Luar Persidangan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah* ”. Pada skripsi ini dipaparkan kedudukan talak di luar pengadilan agama dengan mengkomparatifkan pandangan NU dan Muhammadiyah.

Dalam skripsi Defrianto, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009, “ *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung kec. Sitiung kab. Dharmasraya)* ”. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab Dharmasraya, mengapa tokoh masyarakat berpendapat sahnya talak di luar Pengadilan Agama serta tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Dari telaah pustaka di atas, sudah jelas bahwa permasalahan dalam kajian skripsi ini berbeda. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, skripsi ini akan memaparkan *manhaj istinbat* hukum PERSIS Bangil dan pandangannya tentang keharusan perceraian di Pengadilan, yang kemudian penulis analisis pandangan mereka tersebut.





1. *Asātiz* adalah kata jama dari “*ustāz*” yang bermakna orang yang melakukan pengajaran/mengajar. Pada skripsi ini, *asātiz* dimaknai orang-orang yang mengajarkan permasalahan agama terutama mengenai Syariah atau fikih di Pondok Pesantren PERSIS Bangil.
2. PERSIS BANGIL adalah Pesantren Persatuan Islam (PERSIS), yang bertempat di kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
3. Keharusan adalah kewajiban yang perlu dilakukan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga keharusan ini memberikan dampak terhadap keabsahan perbuatan hukum tersebut. Dalam skripsi ini yang dimaksud adalah keharusan sebagaimana pada pasal 39 (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
4. Perceraian adalah salah satu sebab terputusnya perkawinan, sebagaimana pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah tanggapan dan pemahaman *asātiz* PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama.

### 2. Sumber data

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni *asātiz* PERSIS Bangil.
- b) Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Diantaranya, buku Panduan Hidup Berjama'ah Dalam Jam'iyyah PERSIS, diktat profil PERSIS Bangil, webset PERSIS Bangil dan Brosur Pesantren PERSIS Bangil.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>18</sup> Wawancara ini dilakukan dengan *asātiz* PERSIS Bangil yang berada di kabupaten Pasuruan.

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115



b) Telaah pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Di antaranya buku “A. Hasan Bandung: Pemikir Islam Radikal”, buku “Panduan Hidup Berjama’ah Dalam Jam’iyyah PERSIS”, diktat profil PERSIS Bangil, webset PERSIS Bangil dan Brosur Pesantren PERSIS Bangil.

#### 4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan pandangan *asāṭiz* PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama serta metode ijtihad yang biasa dipergunakan oleh para *asāṭiz* PERSIS Bangil. Selanjutnya, terhadap pemaparan tersebut dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif.

---

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang penulis susun memuat lima bab. Pada bab *pertama*, pendahuluan, meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, perceraian dalam hukum Islam, meliputi, pengertian perceraian, hukum dan dasar hukum perceraian, bentuk perceraian, alasan perceraian, akibat hukum perceraian, hikmah perceraian dan perceraian di depan sidang pengadilan.

Bab *ketiga*, data penelitian, meliputi, profil pesantren PERSIS Bangil, *manhaj istinbat* hukum PERSIS, pandangan *asāṭiz* persis Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama

Bab *keempat*, analisis data, meliputi, analisis terhadap *manhaj istinbat* hukum PERSIS , analisis terhadap pandangan *asātiz* PERSIS Bangil tentang keharusan perceraian di Pengadilan Agama

**Bab kelima, penutup, meliputi, simpulan dan saran**

## BAB II

### PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berasal dari kata cerai, yang berarti berpisah, kemudian mendapat awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’, sehingga menjadi perceraian, yang artinya perpisahan.<sup>1</sup> Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-undang perkawinan sebagai penjelasan “putusnya perkawinan”, yaitu berakhirnya hubungan hidup sebagai suami istri.<sup>2</sup> Dalam ensiklopedi nasional Indonesia, disebutkan perceraian adalah peristiwa putusan perkawinan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.<sup>3</sup> Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>4</sup>

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal dari kata يطلق اطلاق yang berarti ارسد يرسد ارسادا atau فرقة, yang

---

<sup>1</sup> TIM PKPPPB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 2005, h. 200

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, cet. ke-3, 2009, h. 189

<sup>3</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1990, h. 79

<sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994, h. 42













*“diceritakan dari Kasir bin ‘ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Wāsil dan Muhārib bin Disār dari dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda perbuatan halal yang dibenci Allah SWT adalah talak”*

## 2. Hadis riwayat Abdullah bin Umar:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيَرَا جِعَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ  
إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ النَّبِيُّ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا

النِّسَاءُ 18

“diceritakan dari ismāil bin ‘abdullah berkata malik menceritakan kepadanya dari nāfi dari ‘abdullah bin bin Umar r.a, bahwasanya dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa rasulullah saw. Kemudian Umar bin Khatab mempertanyakan hal tersebut dan rasul menyuruh untuk segera kembali kepada istrinya/ruju’ dan menahannya sampai suci kemudian haid dan suci lagi. Setelah itu jika menghendaki dia maka menahannya dan jika menghendaki mentalaknya sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah jika mentalak istrinya.”

<sup>18</sup> Bukhari, *Matan Bukhari*, Juz III, Indonesia: al-Haramain, t.t, h. 268















- d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya;
- e) Istri merasa tertipu baik dalam *nasab*, kekayaan atau kedudukan suami;
- f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.<sup>30</sup>

### 5. *Ta'liq talāq*

Arti dari pada *ta'liq* ialah menggantungkan, jadi pengertian *ta'liq talāq* ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.<sup>31</sup>

Pembacaan *ta'liq ṭalāq* ini tidak merupakan keharusan hanya secara sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan *ta'liq* setelah melakukan akad nikah. *Ta'liq ṭalāq* ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan istri supaya tidak dianiaya oleh suami.

Ketentuan diperbolehkannya mengadakan *ta'liq* itu tercantum di dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 128, yang berbunyi :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا

<sup>30</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h. 114

<sup>31</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 227

*Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>32</sup>*

6.  $Il\bar{a}'$

**$II\bar{a}'$  ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan.**

Sedangkan menurut istilah *ilā'* artinya bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang tidak ditentukan.<sup>33</sup>

Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (*kafarat*) saja. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara; membayar *kafarat* sumpah serta kembali baik kepada istrinya, atau menalak istrinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa. Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* 226-227 :

<sup>32</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 99

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islamiy wa adilatuhu*, Juz IX, Bairut: Dār al-fikr, 2004, h. 7070











tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.<sup>40</sup>

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulū'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u as-šaub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.<sup>41</sup>

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

1. *Fasakh*;
2. *Syiqāq*;
3. *Khulu'*;

---

<sup>40</sup> Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, h. 208

<sup>41</sup> Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, h. 261





- Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam s

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah

- <sup>45</sup> Wacana Intelektual. *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, h. 12

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 303







## G. Perceraian di Sidang Pengadilan

Allah SWT memberikan hak talak pada suami, akan tetapi suami tidak diperkenankan untuk menggunakan talaknya tanpa alasan yang jelas dan tanpa sebab. Sehingga di Indonesia kebolehan talak berlaku selektif yang harus dilakukan di depan Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan akan lebih menjamin hak kaum wanita dan memberikan jaminan terhadap kemaslahatan umat Islam terutama tentang akibat hukum yang akan dirasakan manfaatnya bagi keturunan mereka.<sup>49</sup> Sebagai contoh ketika suami menceraikan istrinya di depan Pengadilan, maka Pengadilan akan menghukum suami untuk membayar uang iddah, uang *mut'ah*, melunasi mahar yang belum lunas, biaya anak-anak yang sesuai dengan kemampuan suami.<sup>50</sup> Begitu juga selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.<sup>51</sup> Kewajiban-kewajiban tersebut akan dituangkan dalam putusan Pengadilan, sehingga suami/istri tidak bisa mengelak dari kewajiban-kewajiban tersebut.

<sup>49</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan-Hukum Kewarisan-Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, cet. ke-4, 2006, h. 19

<sup>50</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, lihat, Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, h. 214

<sup>51</sup> Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam, lihat, Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, h. 210

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah mengeluarkan peraturan, pasal 39 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal ini merupakan ketentuan hukum yang dibuat demi menjaga tujuan *syari’at* dari perceraian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hikmah perceraian di depan sidang Pengadilan Agama akan membawa kepada kemaslahatan, karena akan terjamin hak-hak anak, hak-hak istri atau hak-hak suami istri, sedangkan perceraian di luar Pengadilan akan membawa kepada ke-*madarat-an*, karena hak-hak anak dan hak-hak istri akan terabaikan.

Perlu dipahami juga bahwa perceraian di pengadilan itu lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, yaitu. Pertama,

sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri. Kedua, sebelum mengeluarkan putusan pun, pengadilan bertindak sebagai *hakam* (mediator) untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketiga, perceraian di depan Pengadilan akan memperkecil jumlah perceraian.<sup>52</sup>

Menurut *Ibnu Qayim* yang dikutip, *Ahmed Zaki Yamani*, mengatakan bahwa sesungguhnya *syari'at* itu disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kepentingan umat baik di akhirat atau di dunia. Syariat itu adil sepenuhnya dan seluruhnya merupakan rahmat, kepeningan bagi umat semuanya serta bijaksana seluruhnya. Maka setiap soal yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan, dari rahmat kepada kebalikannya, dari kebaikan kepada kerusakan, dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, tidaklah termasuk dalam *syari'at* walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil”<sup>53</sup>

Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan, bahwa penggunaan kepentingan umum ini sebagai sumber *jurispundensi* hukum Islam dan hal ini memang suatu hal yang disepakati. al-Gazali, memperjelas, kepentingan umum itu bukanlah segala sesuatu yang menyebabkan manfaat atau menolak *maḍarat*. Tetapi ia adalah usaha memelihara dan mengindahkan tujuan syariat Islam. Dan tujuan syariat adalah segala sesuatu yang dapat memelihara agama, jiwa, akal,

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 92

<sup>53</sup> Yamani, Ahmed Zaki, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, terjemahan, penerjemah: K.M.S. Agustjik, judul aslinya: *Asy-Syariatul Khalidat Wa Musykilatul 'Asr*, Jakarta, Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, 1977, h. 19



sejak itu pula dihitung iddahnya. Apabila suami telah menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama merupakan talak yang kedua dan seterusnya masuk dalam waktu *iddah raj'iyah*.<sup>56</sup>

Muhammadiyah dari hasil majelis tarjihnya berpendapat, bahwa perceraian di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sahal Mahfud, *ahkamul fukaha (solusi problematika aktual hukum islam, keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, h. 439

<sup>57</sup> [http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id](http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id) (26 Januari 2009 ), Majelis Tarjih, Perceraian di Luar Pengadilan



4. Periode Lutfie Abdullah Ismail (2002 sampai sekarang)<sup>2</sup>

Pada masa Abdul Qadir Hasan, sistem pendidikan PERSIS Bangil yang sebelumnya memakai sistem angkatan di mana penerimaan santri baru pada setiap 5 tahun sekali, diubah menjadi sistem klasikal.<sup>3</sup> Kemudian pada masa Ghazie Abdul Qadir dan Hud Abdullah Musa, pesantren mengambil keputusan mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah PERSIS dengan mempertahankan tradisi pesantren. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pesantren perlu membekali lulusannya dengan ijazah yang diakui Negara sebagai persyaratan administratif formalistik dengan memprioritaskan muatan materi pelajaran pesantren.<sup>4</sup>

Ciri khas dari pesantren PERSIS Bangil adalah menekankan pemahaman fikih dan hukum Islam kepada peserta didik dengan metode *istinbat* langsung dari al-qur'an dan as-Sunnah.<sup>5</sup> Memasuki dasawarsa ketujuh, pesantren PERSIS Bangil tetap eksis sebagai lembaga pendidikan Islam yang berpegang teguh pada pemahaman dan pengalaman al-qur'an dan as-sunnah.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Suprihatin, Rustina Ambair, *Pesantren Persatuan Islam Bangil Dan Para Alumninya Dalam Dakwa Islam 1936-2007*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007, h. 24

<sup>3</sup> Rifa'I, Labuhana Diah, *Peranan PERSIS Bangil Dalam Usaha Pembaharuan Dan Pemahaman Ajaran Islam*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1986, h. 48

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Salam. *Wawancara*, Bangil, 2 Februari 2010

<sup>6</sup> Suprihatin, *Pesantren Persatuan Islam Bangil Dan Para Alumninya Dalam Dakwa Islam 1936-2007*, h. 24







lanjuti lagi.<sup>11</sup> Kajian ini pun dijadikan sebagai wadah mempererat silaturahmi dan media transformasi ilmu pengetahuan antara para *asātiz*. Dengan demikian dinamika keilmuan di kalangan pesantren pun tetap berjalan.<sup>12</sup>

Menurut *Ustāz* Lutfie, pimpinan pondok pesantren, menyatakan bahwa Pesantren PERSIS Bangil tidak mempunyai hubungan hierarki dengan organisasi Persatuan Islam. Pesantren PERSIS Bangil memiliki sistem dan kurikulum sendiri dalam mengelola pesantren.<sup>13</sup> Berbeda dengan pesantren yang memiliki hierarki dengan organisasi PERSIS, selain adanya persamaan kurikulum, pesantren tersebut diberi nomor urut, misalnya pesantren PERSIS No. 99 Ranca Bango Garut. Meskipun pesantren tidak memiliki ikatan dengan PERSIS pusat, tetapi secara kultur dan emosional tetap terjalin dalam satu komunitas Persatuan Islam (PERSIS). Bentuk konkret pesantren memiliki ikatan kultur dan emosional tersebut, para *asātīz* pesantren banyak menjadi anggota PERSIS dan PERSISTRI<sup>14</sup>. Bahkan ada tiga *asātīz* yang menjadi anggota Dewan Hisbah<sup>15</sup> PERSIS, yaitu, *Ustāz* Lutfie A. Ismail, *Ustāz* Salam

<sup>11</sup> Lutfie Abdullah Ismail, *Wawancara*, Bangil, 6 Desember 2009; Lutfie adalah pimpinan pesantren PERSIS Bangil, alumni S1 Institut Da'wah Islamiyah, Libya dan sekarang menjadi anggota Dewan Hisbah PERSIS.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Lutfie , *Wawancara*, Bangil, 6 Desember 2009; begitu pula keterangan dari Ahsin, Aliga, dan Fatahillah waktu penelitian di Bangil pada tanggal 1-5 Februari 2010.

<sup>14</sup> PERSISTRI adalah Persatuan Islam Istri, badan otonom PERSIS buat para Muslimah PERSIS

<sup>15</sup> Dewan Hisbah adalah Dewan yang membahas permasalahan-permasalahan keagamaan dan hukum Islam di PERSIS





Kemudian dalam melihat as-sunnah, diklasifikasi dua macam, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan mereka mustahil sepakat untuk berdusta, diterima banyak orang pula dan periwayatannya sampai kepada nabi Muhammad Saw melalui penglihatan atau pendengaran langsung. Sedangkan ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang secara terbatas di bawah jumlah mutawatir. Selain klasifikasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, as-sunnah juga diklasifikasikan dari segi periwayatan, yaitu *qatf'iy al-wurud* dan *zanni al-wurud*.<sup>22</sup>

Pada bagian metode *istinbat* hukum terdiri atas enam bagian, yaitu:<sup>23</sup>  
*pertama*, kaidah *usuliyah* (kaidah bahasa) yang mencakup:

- a. pembagian *lafaz* dari segi makna, yaitu *khas* (*muṭlaq, muqayad, amr, nahy*), '*am* dan *musytarak*;
- b. pembagian *lafaz* dari segi pemakaian arti, yaitu *hakikat, majaz, sarih*, dan *kinayah*;
- c. pembagian *lafaz* dari segi cara memahami makna.

**Kedua, cara-cara menyelesaikan *nass* yang nampak bertentangan adalah:**

- a. *Tariqat al-jam'i*, yaitu menggabungkan dua dalil yang nampak bertentangan, dua-duanya dipakai dan diamalkan:

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 211-212

<sup>23</sup> *Ibid.* h, 212-223









1. Tidak menerima *ijma'* secara mutlak dalam bidang ibadah, kecuali *ijma'* sahabat
2. Tidak menerima *qiyas* dalam ibadah *mahdah*, sedangkan dalam masalah ibadah *gair mahdah*, *qiyas* dapat diterima selama memenuhi persyaratan *qiyas*
3. Apabila terjadi pertentangan dalil, langkah yang ditempuh adalah menggabungkan, mencari dalil yang lebih kuat dan melakukan penghapusan apabila urutan dalil dapat diketahui
4. Dalam berijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah ushul fikih sebagaimana lazimnya para fuqaha
5. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab, tetapi pendapat imam mazhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum sepanjang sejalan dengan al-qur'an dan as-sunnah.











Kalau kehidupan keluarganya tidak secara Islam dan terjadi perceraian, kemudian ditanyakan bagaimana konsep Islam mengatasi hal tersebut, maka itu merupakan penghinaan terhadap agama Islam.<sup>36</sup>





menegaskan apabila sebelumnya suami sudah menceraikan istrinya. Berbeda dengan pendapat Nahdlatul Ulama, melalui Bahsul Masail dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta, berpendapat bahwa apabila suami telah menjatukan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama merupakan talak yang kedua dan seterusnya masuk dalam waktu *iddah raj'iyah*.<sup>43</sup> Menurut *Ustāz* Ahsin Lathif, anggota Dewan Hisbah PERSIS, menjelaskan bahwa setiap cerai (talak) harus ada nikah baru, baik talak satu maupun talak dua. Sehingga ketika suami menceraikan istrinya, terus mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama, maka ikrar talak tersebut tidak menjadi talak keduanya karena status mereka memang bukan suami-istri lagi.<sup>44</sup> Kemudian *Ustāz* Aliga Ramli menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat “hak suami terhadap mantan istrinya” waktu masa iddah adalah hak mendapat prioritas menikahi mantan istri dibanding laki-laki lain karena masa iddah mantan istri haram menerima lamaran laki-laki lain.<sup>45</sup> Pemahaman *ruju'* dalam talak satu dan dua tidak ada kaitannya suami boleh kembali kepada mantan istrinya dengan begitu saja. *Ruju'* yang pernah disebutkan dalam sebuah hadits, itu bukan berarti *ruju'*nya tidak menggunakan akad baru. Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan terjadinya hubungan suami istri dan

<sup>43</sup> Sahal Mahfud, *ahkamul fukaha (solusi problematika aktual hukum islam, keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, h. 439

<sup>44</sup> Ahsin lathif, *Wawancara*, Bangil, 4 Februari 2010.

<sup>45</sup> Alig Ramli, *Wawancara*, Bangil, 2 Februari 2010



# ANALISIS PANDANGAN *ASĀTIZ* PERSIS BANGIL TERHADAP KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa PERSIS Bangil dalam menentukan sumber suatu hukum, dasar utamanya adalah al-qur'an dan hadis. Selain itu, tidak bisa menjadi sumber hukum Islam. Dalam ber-*istidlal* dari al-qur'an, PERSIS lebih mengutamakan penafsiran secara *bil ma'sur* dibandingkan *bi ra'yi*. Kemudian dalam ber-*istidlal* dari suatu hadis pun, PERSIS begitu ketat. Dalam menentukan hukum, hanya hadis *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan*. Dalam penentuan hadis pun, hadis tersebut harus *ṣaḥīḥ* secara sanad dan matan. Jadi, tidak sembarang suatu hadis bisa dijadikan dasar suatu hukum. Sedangkan persoalan yang tidak disebutkan secara langsung oleh al-quran dan hadis *ṣaḥīḥ* maka dewan *hisbah* menentukan hukum tersebut berdasarkan kaidah *uṣūl fiqh* sebagaimana lazimnya digunakan para *fuqaha*. Perihal persoalan ibadah *maḥḍah* PERSIS tidak menggunakan *ijma'* selain *ijma'* sahabat dan tidak menggunakan *qiyas*. Kemudian dalam berijtihadnya, PERSIS tidak terikat dengan pada satu mazhab, tetapi pendapat imam mazhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum, selama sesuai dengan jiwa al-qur'an dan hadis. Dalam membangun suatu hukum,

Menurut penulis, prinsip PERSIS dalam penentuan hukum tidak terikat dengan suatu mazhab, perlu diapresiasi karena dengan langkah ini akan menimbulkan formasi baru (*reformasi*) hukum. Akan tetapi, pendekatan PERSIS Bangil yang dilakukan adalah pendekatan tekstual dan pegangan pemikirannya kurang mengedepankan *maqāṣidu syarī'ah* dalam membangun hukum, hal ini akan menjadikan hukum Islam kaku pula dan tidak fleksibel untuk setiap tempat dan jaman. Dan tidak menutup kemungkinan sikap seperti ini akan menghilangkan tujuan syariat (kemaslahatan umum) dari hukum yang ditetapkannya. Dalam perihal ibadah, pendekatan PERSIS Bangil ini masih bisa diterima karena ibadah bersifat paksaan pula dari Allah SWT dan berkaitan urusan individu. Akan tetapi, apabila persoalan tersebut sudah menyangkut *jama'ah*/masyarakat yang lain, maka aspek *maqāṣidu syarī'ah* atau kemaslahatan umum harus menjadi sumber penetapan hukum pula.

Berdasarkan aplikatif metode ijtihad hukum Dewan Hisbah, nampak bahwa Dewan Hisbah tidak memperhatikan kemaslahatan umum sebagai dasar



ini diartikan bukan sesuatu yang menyebabkan manfaat atau menolak *maḍarat*. Tetapi ia adalah usaha memelihara dan mengindahkan tujuan syariat Islam. Tujuan syariat tersebut adalah segala sesuatu yang dapat memelihara agama, jiwa, akal, turunan, dan harta. Segala sesuatu yang memelihara dan menyelamatkan kelima atau salah satu darinya disebut kemaslahatan dan segala sesuatu yang menghilangkan kelima hal tersebut dinamakan kerusakan. Pencegahannya adalah kepentingan.

**B. Analisis Terhadap Pandangan *Asatiz* Persis Bangil Tentang Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama**

## 1. Hukum perceraian

Sebagaimana sumber hukum dan cara ber-*istidlal* dari sumber hukumnya begitu ketat dan tekstual, PERSIS Bangil belum menerima secara penuh hadis dari Abu Daud yang meriwayatkan hadis nabi bahwa “*talak adalah perbuatan halal yang di benci Allah*”. Dengan berpegangan tersebut PERSIS Bangil menganggap hukum cerai adalah *mubah*. Terutama dalam talak, itu merupakan hak prerogatif suami, hak tersebut bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Seandainya pun hadis tersebut diterima sebagai dasar hukum, menurut mereka tetap saja hukum dari perceraian itu *mubah*, karena itu suatu yang halal, dan rasul tidak pernah melarangnya.

[illegible]



Berdasarkan penelaahan terhadap apa yang telah penulis dapat dalam penelitian, menunjukkan bahwa para *asātiz* PERSIS Bangil mengakui kemanfaatan bukti autentik perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Alasannya karena akan mendapatkan bukti autentik di masyarakat bahwa pasangan tersebut sudah bercerai, suami pun tidak mudah menjatuhkan talak, pemeliharaan anak pun tidak terabaikan dan terjaminnya pembayaran nafkah *mut'ah*. Hal ini terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui hak dan kewajiban (akibat hukum ) apabila mereka bercerai. Sedangkan negatifnya, selama proses persidangan

Dari keterangan tersebut, penulis bisa menganalisis bahwa PERSIS Bangil mengakui perceraian di Pengadilan Agama lebih *maṣlahat* dan perceraian di luar Pengadilan Agama menjadi *maḍarat* bagi kaum muslimin. Hal ini sama dengan filosofis dari peraturan keharusan cerai di depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian, menurut penulis, seandainya pemahaman ini tetap berlangsung maka akan terjadi dualisme hukum, dan kepastian hukum pun akan kabur. Melihat pandangan *asātiz* PERSIS Bangil seperti itu, menunjukkan bahwa pandangannya tentang talak masih bersifat individu dengan tuhan, aspek sosial dari perkawinan dan perceraian tidak diperhatikan.

Menurut penulis pada saat ini, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu fikih *munakahat* dalam bentuk yang baru yang diberlakukan di Indonesia. Memang ada perbedaan dengan

75

Keabsahan perceraian menurut *asatiz* PERSIS Bangil tetap berpatokan pada persyaratan secara *syar'i*. Sehingga perceraian di luar pengadilan pun tetap sah apabila memenuhi persyaratan *syar'i*, yaitu ketentuan al-qur'an dan hadis. Adapun persyaratan yang dikemukakan *asātiz* PERSIS Bangil adalah suami dengan sadar dan sengaja menceraikan, keadaan istri tidak dalam masa haid dan dihadiri saksi saat pengucapan talaknya.

Menurut penulis, kalau kita mencoba mendiskusikan teks dan realitas, maka sebenarnya keberadaan Pengadilan Agama dalam persengketaan perceraian sesuai dengan *syar'i*. Sebagaimana firman Allah SWT. QS. *an-Nisa'* ayat 35,

وَلَا خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya

Dalam ayat tersebut, ada kata “*ḥakam*” yaitu juru damai. Perceraian ditahan terlebih dahulu sebelum menghadirkan *ḥakam*. Ayat tersebut menyebutkan *ḥakam* dari keluarga laki-laki dan perempuan, tetapi dalam masa sekarang, bisa ditafsirkan bahwa fungsi *ḥakam* dari persengketaan tersebut selain dari pihak keluarga tetapi lebih tepat Hakim Pengadilan Agama. Apalagi sekarang ada sertifikasi sebagai hakim mediator, setelah mengikuti pelatihan mediasi. Karena Hakim lebih kompeten dalam pengertian “*ḥakam*” tersebut, maka perceraian pun diharuskan di depan sidang Pengadilan Agama.

Kemudian sebagaimana pendapat *asāṭiz* PERSIS Bangil bahwa perceraian pun harus ada saksi. Maka, seharusnya saksi tersebut pun harus saksi yang adil dan yang paham akan kehidupan keluarga pasangan yang akan bercerai. Berdasarkan pemahaman ini seharusnya perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat meneliti keadilan saksi dan menyumpah saksi tersebut. Di samping itu, perceraian di depan sidang Pengadilan Agama akan lebih memberikan kepastian hukum serta memberikan kemaslahatan.

Perlu dipahami juga bahwa perceraian di pengadilan itu lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian. Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir, bahwa kesesuaian tersebut,

Pemahaman “*fiqh*” yang mengharuskan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama untuk saat ini bagi umat Islam di Indonesia, sama sebagaimana ijtihad Umar bin Khatab r.a. tentang hukum talak pada kepemimpinannya. Berdasarkan kepentingan umum, Umar bin Khatab r.a. mengubah hukum talak dalam keadaan suami menjatuhkan talak tiga sekaligus, pada satu ketika dan tempat. Padahal pada masa Rasulullah Saw sampai awal pemerintahan Umar bin Khatab, talak itu dianggap talak satu. Kemudian Umar berpendapat bahwa masyarakat telah mempermudah persoalan itu, maka perlu diberi pelajaran dengan menjadikan talak semacam itu menjadi talak *bain*. Begitu pula, pada saat ini, masalah talak ini diharuskan dilakukan depan pengadilan supaya menjaga kepentingan umum (kemaslahatan) yang menjadi tujuan dari syariat talak itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah mengeluarkan peraturan, pasal 39 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

### 3. Rekomendasi PERSIS terhadap peraturan perceraian

bertugas untuk meninjau perceraian yang dilaporkan apakah perceraianya sudah sesuai *syar'i* atau belum, yaitu diharuskannya ada saksi dan dalam keadaan sadar saat menceraikan dan keadaan istri tidak dalam keadaan haid. Setelah itu baru dibuatkan surat cerai sebagai alat bukti perceraian mereka. Bagi mereka yang belum menceraikan maka di proses perceraianya di Pengadilan Agama. Sehingga pemerintah tidak mengubah hukum yang sudah pasti ditentukan dalam *syar'i*. Kemudian

[illegible]

Menurut penulis, keharusan perceraian merupakan langkah memperkecil angka perceraian. Adapun penyebab perceraian, yang melatar belakangi perceraian seperti masalah moral, pendidikan dan ekonomi, permasalahan bidang itu sudah ada bagian yang menanganinya, yaitu di bawah kepemimpinan eksekutif. Sehingga langkah-langkah, yudikatif dan eksekutif ini harus berjalan bersamaan demi kemaslahatan umum.



**BAB V**

**PENUTUP**

### A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun, maka simpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode ijtihad yang digunakan PERSIS Bangil sebagaimana yang sudah ditetapkan pedoman ijtihadnya dalam dewan hisbah PERSIS. Dalam pedoman ijtihad tersebut, dinyatakan bahwa yang menjadi sumber dasar hukum Islam adalah al-qur'an dan hadis. Dalam ber-*istidlal* dari al-qur'an, PERSIS lebih mengutamakan penafsiran secara *bil ma'sur* dibandingkan *bi ra'yi*. Kemudian dalam ber-*istidlal* dari suatu hadis, PERSIS begitu ketat. Dalam menentukan hukum, hanya menggunakan hadis *ṣahih* atau *hasan*. Dalam penentuan hadis pun, hadis tersebut harus *ṣahih* secara sanad dan matan. Jadi, tidak sembarang suatu hadis bisa dijadikan dasar suatu hukum. Sedangkan persoalan yang tidak disebutkan secara langsung oleh al-quran dan hadis *ṣahih* maka dewan hisbah menentukan hukum tersebut berdasarkan kaidah ushul fikih sebagaimana lazimnya digunakan para *fuqaha* dan tidak terikat oleh satu mazhab. Kemudian terkait “*maqāsidu syarī'ah*”, PERSIS hanya menjadikannya sebagai suatu

hikmah dari hukum yang sudah ada, dan tidak bisa menjadi perubahan asal hukum yang sudah ada.

2. Bagi para *asātiz* PERSIS Bangil keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama merupakan permasalahan administratif, sehingga jika perceraian sudah terjadi di luar Pengadilan maka perceraian tersebut tetap sah. Akan tetapi, *asātiz* PERSIS Bangil tetap menyarankan supaya melakukan perceraian di Pengadilan Agama agar mendapat perlindungan hukum negara dalam kehidupan selanjutnya.
3. Dalam menentukan suatu hukum PERSIS Bangil tetap berpegang terhadap pemahaman tekstual sehingga hukum Islam tidak bersifat fleksibel di setiap jaman. Seandainya perceraian di Luar Pengadilan tetap sah, maka kemaslahatan umum kaum muslimin di Indonesia akan terhambat. Padahal keharusan perceraian lebih sesuai dengan syariat, karena hakim menjadi *hakam* dalam persengketaan pasangan suami-istri tersebut, dan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai alasan-alasan perceraianya.

## B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pembaca bahwasanya perundang-undangan yang mengharuskan perceraian di Pengadilan Agama lebih sesuai dengan tujuan syari'at "*Maqāṣidu syarī'ah*" dari hukum perceraian.
2. Kepada Persatuan Islam (PERSIS) untuk membahas permasalahan perceraian di luar Pengadilan Agama dalam Dewan Hisbah PERSIS sehingga mempunyai pengaruh nasional dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian dalam menetapkan suatu hukum, diharapkan PERSIS lebih kontekstual memahami al-qur'an dan hadis, serta porsi "*Maqāṣidu syarī'ah*" dalam penentuan hukum lebih diprioritaskan.
3. Kepada pemerintah untuk selalu menyosialisasikan makna dari tujuan perkawinan dan makna perceraian. Di samping itu, pemerintah bertanggung jawab pula dalam mencerdaskan masyarakat baik dalam masalah hukum maupun moralnya, demi memperkecil angka perceraian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazhab Arba'ah*, Juz IV, Mesir, Maktabah al-Tijariyah, t.t
- Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta, LKiS, 2000
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, terjemahan, penerjemah: Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, judul aslinya: *al-ijtihad: al-naṣ al waqī'i, al-maṣlaḥah*, Jakarta, Erlangga, 2002
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, cet. ke-3, 2009
- As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daār al-Fikr, cet. ke-7, 1983
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, cet. ke-9, 2000
- Bukhari, *Matan Bukhari*, Juz III, Indonesia: al-Haramain, t.t
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1996
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet ke-2, 1985
- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut, Dār al kutub al ilmiyah, 1984
- Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, cet. ke-1, 2002
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. ke-4, 2004
- Lutfie Abdullah Ismail, *Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil*, t.t
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya, al Ikhlas, cet. ke-2, 1993
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan-Hukum Kewarisan-Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, cet. ke-4, 2006
- Mughni, Syafiq A, *Hasan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, Surabaya, Bina Ilmu, cet. ke-2, 1994
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, edisi kedua, 1997
- Qurrotul A'yuni, *Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Muhammadiyah dan NU*, skripsi, UIN Kali jaga Yogyakarta, 2009
- R. Subekti, *Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994
- Rifa'I, Labuhana Diah, *Peranan PERSIS Bangil Dalam Usaha Pembaharuan Dan Pemahaman Ajaran Islam*, Surabaya: Fakultas Adab – Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1986
- Sahal Mahfud, *ahkamul fukaha (solusi problematika aktual hukum islam, keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, Surabaya, LT NU Jawa Timur dan Diantama, 2004
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Lberty, cet. ke-2, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suprihatin, Rustina Ambair, *Pesantren Persatuan Islam Bangil Dan Para Alumninya Dalam Dakwa Islam 1936-2007*, Surabaya: Fakultas Adab – skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Tesis dan Disertasi*, cet. 21, Yogyakarta: Andi Offset, 1994
- Wahbah Zuhaily, *al-Fikih al-Islamiy wa adilatuhu*, Juz IX, Bairut: Dār al-fikr, 2004
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadiian Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, cet ke-2 2001
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Syamil Cipta Media, t.t
- Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokus Media, cet. ke-1, 2005
- TIM PKPPPB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 2005
- Wacana intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia*, 2007Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1990
- Yayasan PERSIS Bangil, t.t

Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel No.  
in.02/PP.00.9/32.a/1/2010 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi

[http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=866&Itemid=225](http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=866&Itemid=225)

<http://PERSISbangil.cbj.net;>

Ahsin Lathif, *Wawancara*, Bangil, 4 Nopember 2010

Aliga Ramli, *Wawancara*, Bangil, 2 Febuari 2010

Wajiz, *Wawancara*, Bangil, 2 Februari 2010

Umar Fanany, *Wawancara*, Bangil, 5 Februari 2010

Ummi, *Wawancara*, Bangil, 4 Februari 2010

Lutfie Abdullah Ismail, *Wawancara*, Bangil, 6 Desember 2009

Lutifie Abdullah Ismail, *Wawancara*, Bangil, 3 Februari 2010

Fatahillah, *Wawancara*, Bangil, 1 Februari 2010

Salam, *Wawancara*, Bangil, 2 Februari 2010

Tajunnisa, *Wawancara*, Bangil, 3 Februari 2010